

# Penyelesaian Konflik Lahan antara Pemda DKI Jakarta dengan Warga: Pendekatan *Perspektif Peacemaking Criminology* (Studi Kasus CAP 16 Kampung)

Noor Azlin Tauchid, Anggi Aulina Harahap  
Universitas Indonesia  
caintheholymydragonx@gmail.com

## Abstract

Eviction is phenomenon that happens in city livelihood related to city and human life development. In practice, eviction could lead to conflicts and social injury in which it causes reactions from the victims. CAP 16 Kampung is one of the reactions, in which the victims started a coalition to demand their participation in city development. CAP 16 Kampung process that involves dialogs and participatory actions are in line with Peacemaking Criminology perspective. From Peacemaking Criminology approach, CAP 16 Kampung in the evicted Kampung Aquarium fares much better due the already existing empathy and their affirmation actions about their shared fate as evicted victims. The other kampung, Kampung Muara Baru that yet to be evicted doesn't have the same degree of success because they didn't share the same threat as Aquarium did and there is no solid affirmation from them due the lacks of empathy being built.

**Keywords:** Forced Eviction, Social Injury, Social Movement, Peacemaking Criminology, CAP 16 Kampung

## Pendahuluan

Salah satu permasalahan yang masih sering dihadapi di kawasan perkotaan adalah penggusuran. Meski pembangunan memang membutuhkan dilakukannya penggusuran, pada praktiknya, penggusuran yang dilakukan seringkali dalam bentuk penggusuran paksa. Misalnya tercatat pada tahun 2006, Gubernur Sutiyoso diminta oleh sejumlah elemen masyarakat untuk menghentikan penggusuran di daerah Pejompongan dan Mangga Besar karena dianggap penggusuran tersebut sebagai bentuk penggusuran paksa karena dalam prosesnya digunakan aparat yang melakukan tindakan kekerasan (Editorial detiknews, 2006).

Meski sempat menurun, sepanjang tahun 2015 hingga 2016 data memperlihatkan bahwa terjadi kenaikan tren penggusuran paksa di DKI Jakarta yang mirip dengan kenaikan tren penggusuran yang terjadi pada tahun 2007 hingga 2012 (Januardy, Aldo Fellix, 2015). Terdapat beberapa alasan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas dilakukannya penggusuran, antara lain: alasan normalisasi sungai di Jakarta, penertiban rumah dan pemukiman kumuh, pembangunan taman kota, pelebaran jalan, penertiban rumah dan usaha yang berdiri di jalur hijau, pembangunan proyek MRT, penertiban IMB dari bangunan yang belum memiliki

surat ijin, dan beberapa faktor lainnya. Kampung yang merupakan tempat tinggal informal yang ada di Jakarta juga tidak lepas menjadi target dari proses penertiban dan penggusuran paksa yang dilakukan. Hal ini tentunya menghasilkan konflik dan mengakibatkan kerugian yang dialami oleh korban tergusur.

Kerugian yang dialami oleh warga dari penggusuran paksa ini antara lain adalah kehilangan tempat tinggal, terpaksa pindah ke lokasi yang jauh dari tempat kerja sehingga biaya hidup naik, terpaksa terpisah dari keluarga yang masing-masing direlokasi atau terpaksa pindah ke tempat yang berbeda, terpisah dari lingkungan tempat tinggal sebelumnya yang masyarakatnya telah memiliki akar budaya, baik secara personal maupun komunal; kehilangan pekerjaan dan penghasilan, serta korban fisik dan jiwa baik dari konfrontasi saat penggusuran maupun sakit (Januardy, Alldo Felix, 2015) (Januardy, Alldo Felix; Julio Castor Achmadi; Cindy Iqbalini Fortuna, 2016). Dalam menangani hal tersebut, solusi pasca penggusuran yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara lain dalam bentuk relokasi dan ganti rugi, namun pada prakteknya hanya sebagian yang menerima ganti rugi dari penggusuran paksa yang dilakukan, sementara mayoritas korban gusuran tidak menerima solusi apapun dan terpaksa untuk pindah secara mandiri.

Penggusuran paksa yang dilakukan mengundang berbagai macam reaksi, terutama dari korban gusuran. Contohnya seperti yang dilakukan oleh Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) dengan melakukan Community Action Plan (CAP) (JRMK, 2018). JRMK menggandeng 16 kampung dan komunitas masyarakat kelas bawah yang terdampak dari kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Di dalam CAP 16 Kampung, perencanaan dan penataan akan ruang spasial tidak lagi hanya bersifat top-down yang ditentukan oleh pemerintah saja, namun warga juga dituntut untuk berperan sebagai penggerak dan sumber inspirasi dari rencana penataan kampung.

Lewat CAP 16 Kampung, warga dapat merencanakan secara bersama dan mendapatkan solusi yang juga tidak hanya bersifat partisipatif baik secara individu dan kelompok, tetapi juga ditujukan untuk mendapatkan solusi yang tidak merusak kohesi sosial antar warga di dalam kampung. Sebagai reaksi, hal tersebut didalam ilmu kriminologi memiliki kesesuaian dengan perspektif kritis didalam ilmu kriminologi yang menantang struktur penyelesaian yang sudah ada dan menyediakan alternatif tandingan atas cara memandang suatu kejahatan dan proses kontrolnya. Salah satu perspektif didalam pemikiran kritis ilmu kriminologi yang memiliki kecocokan dengan CAP 16 Kampung adalah Peacemaking Criminology.

Peacemaking criminology merupakan paradigma yang mengedepankan proses peacemaking, yaitu proses yang secara aktif mendorong agar terjadinya kerukunan yang berasal dari proses dialektik dari wacana yang ada, sehingga muncul rasa responsif dari masing-masing subyek yang terkait dengan suatu kondisi sosial (Pepinsky, Harold E., and Richard Quinney, 1991). Salah satu contoh penggunaan Peacemaking criminology dalam penyelesaian permasalahan adalah family court di daerah khusus Navajo di Amerika Serikat. Didalam penyelesaian konflik di Navajo, mereka tidak menggunakan paradigma barat yang kaku didalam penyelesaian permasalahan namun menggunakan peran individu dan komunitas dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi (Pepinsky, A Criminologist's

Quest for Peace, 2000). Penyelesaian kasus dibimbing oleh naat'áanii atau penyembuh untuk mengembalikan hózhó atau solidaritas dan kehangatan yang ada di masyarakat.

Dalam proses penyelesaian yang dilakukan sehingga didapatkan proses yang berjalan dengan baik dan benar, titik temu dan solusi dalam bentuk reaksi terhadap peristiwa sosial penggusuran yang dilakukan masyarakat, penulis ingin mengetahui bagaimana CAP 16 Kampung yang dilakukan oleh komunitas dan warga kampung sebagai reaksi terhadap penggusuran dalam perspektif Peacemaking Criminology?

Sesuai dengan pertanyaan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan dan mengevaluasi proses penyelesaian yang telah dilakukan dan proses penyelesaian yang akan dilakukan dalam menyelesaikan kasus penggusuran paksa pada warga kampung dan melakukan evaluasi terhadap prosesnya, dilihat dari perspektif Peacemaking Criminology.

## Tinjauan Teoritis

Gerakan sosial menurut Johnston (Johnston, 2014) adalah gerakan yang terbentuk secara sosial dan menjadi kekuatan kunci dari perubahan sosial yang ada di dunia modern. Selain itu karakteristik lain yang dapat dilihat secara langsung dari gerakan sosial adalah gerakan sosial bergerak dan memobilisasi kepentingannya diluar politik dan jalur-jalur institusi yang ada. Dari kedua karakteristik tersebut, gerakan sosial pada dasarnya bertujuan untuk mengajukan perubahan dari status quo yang ada dan dianggap tidak mawadahi kepentingan individu maupun kelompok dair gerakan sosial tersebut.

Gerakan sosial terbentuk dari beberapa dimensi. Dimensi yang pertama, gerakan sosial pada umumnya tidak berdiri sendiri tetapi merupakan suatu jaringan dari

bermacam kelompok masyarakat yang didalam status quo pada umumnya memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Dimensi yang kedua, ide yang mendasari gerakan, kemudian membimbing dan menciptakan ikatan sosial pada umumnya berasal dari ideologi, tujuan, nilai dan kepentingan yang berasal dari pemikiran-pemikiran besar yang telah diakui. Selain hal tersebut, identitas kolektif juga menjadi kunci yang mengikat masing-masing individu dan kelompok didalam ikatan sosial yang ada. Dimensi yang ketiga, gerakan sosial ditampilkan didalam bentuk-bentuk performatif yang kaya akan metafora dan simbologi yang melambangkan perlawanan mereka, seperti lagu, yel-yel, umbul-umbul, jargon dan pidato.

Sementara menurut Tarrow (Tarrow, 2011), gerakan sosial pada dasarnya adalah bentuk-bentuk perlawanan secara politik. Tindakan kolektif ini merupakan perlawanan yang digunakan oleh orang-orang yang tidak memiliki akses reguler ke birokrasi dan institusi negara yang mampu menghasilkan kebijakan, yang kelompok tersebut bertindak atas nama klaim baru, dan kelompok yang bertindak secara fundamental menantang orang lain atau pihak yang berwenang.

CAP 16 Kampung yang dilakukan oleh organisasi kampung di Jakarta yang terdampak dan berpotensi terdampak dari penggusuran memiliki ciri-ciri dan karakteristik dari gerakan sosial. Cap 16 Kampung berasal dari berbagai macam kelompok dan kepentingan seperti warga kampung, tukang becak, pedagang kakilima, akademisi, organisasi masyarakat dan kelompok-kelompok lain yang pada umumnya terpisah oleh kepentingan yang berbeda-beda, namun dengan adanya CAP 16 Kampung, mereka memiliki ikatan sosial dengan tujuan yang sama. Selain itu CAP 16

Kampung juga digunakan sebagai bentuk perlawanan dari kebijakan terkait penataan kota yang satu arah, dengan dilakukan diluar sistem yang ada.

Menurut banyak ahli (Ness, Daniel, & Karen Heetderks, 2002) Peacemaking Criminology, bentuk praksis dari perspektif tersebut berpusat pada gagasan tentang restorative justice. Restorative justice bertumpu pada tiga proposisi utama. Proposisi yang pertama, Keadilan yang dilakukan ditujukan untuk memulihkan orang-orang yang terdampak dari suatu kejahatan: yaitu korban, masyarakat, dan bahkan pelaku kejahatannya itu sendiri. Proposisi yang kedua, mereka yang paling terlibat langsung dan terkena dampak kejahatan yaitu korban, pelaku kejahatan dan masyarakat harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi sepenuhnya sesuai dengan aspirasi dan keinginan mereka. Proposisi yang ketiga, Pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan tatanan sosial yang adil, yang didalam tatanan sosial tersebut peran masyarakat dalam membangun dan memelihara perdamaian yang adil harus diberi proporsi yang khusus, terutama ketika pemerintah tersebut adalah pelaku kejahatan itu sendiri. Pemerintah dituntut harus sabar dan arif, serta bijaksana dalam menggunakan kuasa yang dimiliki.

John Fuller (Braswell, Michael, John Fuller, Bo Lozoff. , 2001) mendefinisikan teori Peacemaking criminology dalam bentuk sebuah piramida yang terdiri dari 6 bagian. Keenam bagian tersebut merepresentasikan Peacemaking criminology yang diambil dari berbagai konsep dan pendekatan yang ada. Keenam bagian tersebut antara lain: Prinsip non-violence, Social justice, Inclusion, Correct means, Ascertainable criteria dan Categorical imperative.

Prinsip Nonviolence, menurut Quinney (Quinney, 1991), adalah prinsip yang

menolak kekerasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan juga kekerasan yang digunakan oleh negara dalam menegakkan hukum itu sendiri. Dengan tujuan memastikan bahwa didalam penyelesaian yang dilakukan tidak didasarkan pada kekerasan, maka yang menjadi pondasi paling awal dari penyelesaian suatu kejahatan. Didalam proses Peacemaking Criminology, kekerasan diupayakan untuk dicegah sebelum terjadi, dan jika sudah terjadi akan dicari proses penyelesaian yang memastikan tiadanya kekerasan sebagai pondasi penyelesaian tersebut.

Social justice, menurut Harris (Harris, 1991), adalah bentuk selanjutnya yang harus dilakukan dalam peacemaking, dengan memberikan konsep yang lebih komprehensif dalam menyelesaikan permasalahan hingga keakarnya. Didalam kasus penggusuran yang terjadi selama ini, selain dimensi aspek legalitas dan penataan kota, terdapat juga aspek ketidakadilan sosial yang harus diperhatikan. Ada dimensi seperti kemiskinan, status sosial dan ikatan sosial di masyarakat. Maka proses Peacemaking criminology yang dilakukan haruslah menjamin adanya keadilan sosial, sehingga akar permasalahan yang muncul dari berbagai dimensi dapat diselesaikan secara komprehensif.

Inclusion, menurut Gesualdi (Gesualdi, 2014), adalah menyadari bahwa proses peacemaking adalah proses inklusif yang harus melibatkan semua orang yang menjadi pemangku kepentingan dari konflik yang ada. Bukan hanya negara, korban dan pelaku. Semua pemangku kepentingan harus diikuti sertakan agar bisa terjadi perubahan positif kedepannya. Didalam Peacemaking Criminology, harus dipastikan bahwa setiap orang harus memiliki suara didalam permasalahan yang ada, dan Peacemaking harus dimulai dengan memastikan suara setiap kepentingan, terutama korban, untuk

diberi kesempatan dan didengarkan.

Correct means, menurut Pepinsky (Pepinsky, Harold E., and Richard Quinney, 1991), adalah kesadaran yang dibentuk bahwa untuk mendapatkan kedamaian yang sesungguhnya, semua proses yang dilakukan haruslah proses yang baik bukan semata-mata hanya ingin mendapatkan hasil yang baik saja. Peacemaking criminology harus membuka kesempatan pemangku kepentingan didalam kasus penggusuran untuk menyampaikan pendapatnya tanpa adanya rasa takut dari ancaman, dasar ketaatan dan tekanan rasa bersalah.

Ascerttainable criteria, menurut Pepinsky (Pepinsky, A Criminologist's Quest for Peace, 2000), adalah penggunaan prinsip-prinsip yang tidak hanya obyektif, namun juga dimengerti oleh semua pihak. Pada sistem peradilan pidana yang umum, hukum dan hak yang dimiliki oleh setiap pihak mungkin dimengerti oleh hakim, dan praktisi hukum lain namun tidak oleh pelaku dan korban yang merupakan awam dalam dunia hukum. Dalam peacemaking, semua hal tersebut haruslah dimengerti oleh setiap pihak sehingga bisa tercapai persidangan yang adil. Proses Peacemaking criminology harus memastikan bahwa setiap pemangku kepentingan mengetahui dan memahami fenomena yang terjadi dari sudut pandang setiap pemangku kepentingan.

Categorical imperative, menurut Fuller (Fuller, 2003), adalah suatu proses yang memahami prinsip-prinsip keadilan sebagai nilai universal yang dapat diterima oleh setiap pemangku kepentingan. Sementara menurut Pepinsky (Pepinsky, A Criminologist's Quest for Peace, 2000), konsep ini juga diartikan sebagai menempatkan diri di posisi orang lain, agar dapat merasakan hal yang orang lain rasakan dan dimaknai sebagai proses empati. Peacemaking criminology harus meniti setiap aspek dari yang paling bawah

secara satu persatu untuk mencegah dan menyembuhkan dinginnya hubungan yang terjadi, mengembalikan kehangatan empati dan memunculkan harapan.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian evaluatif kualitatif. Menurut Powell (Powell, 2006), penelitian evaluatif adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian sosial yang dalam proses penilaiannya difungsikan sebagai bentuk evaluasi. Sementara itu menurut Rutman (Rutman, 1984), penelitian evaluatif adalah metode ilmiah untuk mengukur implementasi dan hasil program untuk tujuan pengambilan keputusan. Sementara menurut Scriven (Scriven, 1991), metode evaluatif adalah proses penentuan kelebihan, kemampuan, dan nilai ekonomi dari sesuatu.

Teknik yang digunakan dalam metode penelitian evaluatif ini adalah analisis Beneficiary Assessment (BA). Analisis Beneficiary Assessment (BA) menurut Salmen (Salmen, 2002) adalah alat analisa yang pendekatannya bersifat kualitatif, yang pendekatannya kualitatifnya dalam upaya untuk memperoleh pemahaman dari pengalaman bersama sebagai obyek observasi, dan digunakannya sentralitas dari sudut pandang orang lain. Subyek penelitian akan, menilai nilai dari pekerjaan, proyek, atau kebijakan yang diteliti. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman dari penilaian manfaat didalam proses menghargai proses perencanaan atau perkembangan dari aktivitas yang dinilai secara berkelanjutan.

Tahapan didalam BA dilakukan dengan menentukan Rationale atau wacana yang akan dibahas, kemudian direfleksikan dengan konteks indikator dari teori Peacemaking dan dari proses refleksi tersebut akan diketahui dampak dari suatu kegiatan atau kebijakan yang diambil. Dampak yang muncul akan menjadi obyek



analisis untuk menghasilkan kesimpulan.

Ada 3 rationale atau wacana besar yang ingin diketahui didalam penelitian ini untuk memahami proses CAP 16 Kampung dalam penyelesaian penggusuran yang ada didalam pendekatan perspektif Peacemaking criminology, yaitu rationale kerugian, rationale didalam proses peacemaking, dan rationale harapan dari proses CAP 16 Kampung.

Didalam bagian rationale kerugian yang terjadi akan coba diketahui 3 hal, yaitu kerugian yang dialami oleh korban penggusuran, solusi yang sudah diberikan, dan bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang terjadi. Untuk memahami hal tersebut, peneliti akan menggunakan 2 teori, yaitu luka sosial dan hubungan antara luka sosial dengan hak asasi manusia dalam proses penggusuran.

Didalam bagian rationale proses Peacemaking, akan digunakan teori Fuller yang membagi Peacemaking criminology menjadi 6 bagian, yaitu Non-violence, Social justice, Inclusion, Correct means, Ascertainable criteria dan Categorical imperative.

Didalam bagian rationale harapan, diketahui bahwa proses peacemaking criminology, pada dasarnya adalah proses yang berbeda dengan proses penyelesaian kejahatan, luka sosial dan konflik yang dilakukan secara umum. Peacemaking criminology tidak menawarkan keadilan dalam bentuk penghukuman, tidak juga peacemaking criminology menawarkan hasil dan kepastian yang terikat waktu. Peacemaking criminology menolak kedua hal tersebut, karena penghukuman adalah bentuk pemberian rasa sakit dan rasa sakit dalam perspektif Peacemaking criminology adalah asal dari segala kejahatan. Peacemaking criminology adalah proses perjalanan spiritual dari setiap pemangku

kepentingan untuk menuju yang tidak dapat diketahui, yang disana berada empati dan hilangnya penderitaan. Harapan dari setiap pemangku kepentingan akan menjadi perahu yang mengantarkan mereka dalam perjalanan menuju kedamaian dari konflik yang mereka alami, dan agar dapat diambil pelajaran dan maknanya dari proses penggusuran dan CAP 16 Kampung.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data hasil wawancara sebagai data utama. Penulis mewawancarai 2 kampung yang berbeda, satu yang telah tergusur dan satu lagi di wacanakan akan tergusur, sebagai sasaran wawancara sehingga dapat dilihat perbandingan proses penyelesaian antara 2 kampung. Unit analisa dari penelitian ini adalah para pemangku kepentingan yang terkait dalam penyelesaian konflik penggusuran ini sebagai subyek yang diwawancara, yaitu:

Warga kampung Akuarium yang telah digusur.

Warga kampung Muara Baru yang terancam digusur.

LSM.

LSM yang menjadi target wawancara adalah JRMK, pendamping hukum dari LBH Jakarta yang mendampingi warga kampung Akuarium terkait urusan hukum CAP 16 Kampung, dan pendamping dari kampung Akuarium dan Muara Baru.

Pemerintah.

Pemerintah yang menjadi target wawancara adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, yang diberikan tugas sebagai penanggung jawab jalannya CAP dan Komnas HAM.

## Hasil Penelitian

### 1. Rationale Kerugian

Dari hasil wawancara terkait kerugian dari proses penggusuran dan solusi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta didapatkan informasi antara lain sebagai berikut.

Dalam rationale kerugian yang dialami oleh warga, didapatkan informasi telah terjadi luka sosial dari pengusuran paksa di Kampung Akuarium dalam bentuk luka fisik dalam bentuk sakit, dan korban jiwa dari sakit yang dialami; luka finansial dalam bentuk kehilangan properti dan hilangnya moda ekonomi, luka emosional; luka emosional yang dialami warga dalam bentuk stress, pemisahan dari keluarga dan komunitas, dan hilangnya kenangan akan tempat bermukim sebelumnya; dan luka keamanan kultural dalam bentuk hilangnya identitas sebagai warga negara.

Dalam rationale solusi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, didapatkan informasi bahwa dalam upaya penyelesaian untuk kampung yang tergusur, solusi yang diberikan hanyalah rumah susun. Ada solusi dalam bentuk lain berupa konsolidasi tanah, namun solusi tersebut tidak diambil oleh pemerintah dalam kasus pengusuran kampung Akuarium. Sementara itu untuk kampung yang belum tergusur tetapi ada wacana pengusuran, selama ini belum ada solusi yang diberikan. Solusi seperti pembangunan untuk peningkatan kualitas kampung dan penurunan tingkat kekumuhan tidak dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Seluruh pembangunan yang ada di kampung Muara Baru sifatnya swadaya dan tanpa bantuan pemerintah.

Dalam rationale pelanggaran HAM yang terjadi dari proses pengusuran, didapatkan informasi bahwa ditemukan dugaan bentuk-bentuk pelanggaran HAM seperti penggunaan kekuatan berlebih seperti penggunaan tentara, satpol PP dan polisi dalam eksekusi pengusuran, penghilangan hak atas tempat tinggal dan hak atas penghasilan seperti dengan

pengusiran yang dilakukan dari tempat bermukim sebelumnya, dan hak atas rasa aman seperti dengan ditempatkannya alat-alat berat di kawasan pemukiman yang seolah-olah mengintimidasi warga yang akan digusur. Selain itu juga ditemukan permasalahan dalam prosedur seperti keluarnya Surat Peringatan (SP) 1, 2 dan 3 yang begitu cepat dan pengusuran paksa yang dilakukan didalam waktu-waktu yang dilarang. Dalam penjelasan Komnas HAM, Indonesia memang belum memiliki regulasi yang mengatur tentang pengusuran yang berdasarkan HAM, dan Komnas HAM juga belum mengklasifikasi pengusuran paksa sebagai pelanggaran HAM berat meski sudah diklasifikasi sebagai pelanggaran HAM berat oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

## 2. Rationale proses Peacemaking Criminology yang dilakukan.

Dari hasil wawancara terkait pendekatan Peacemaking criminology dalam proses CAP 16 Kampung didapatkan informasi antara lain sebagai berikut.

Untuk Kampung Akuarium yang sudah mengalami pengusuran, untuk aspek Non-violence, didapatkan informasi bahwa tidak ada bentuk kekerasan, baik dalam bentuk kekerasan fisik dan mental, maupun dalam bentuk paksaan selama berjalannya CAP 16 Kampung yang dilakukan di kampung tersebut. Sehingga dapat disimpulkan untuk aspek Non-violence sudah tercapai didalam proses CAP 16 Kampung di Kampung Akuarium. Begitu juga untuk Kampung Muara Baru yang belum mengalami pengusuran, tidak ada bentuk-bentuk kekerasan yang dialami atau dilakukan. Sehingga dapat disimpulkan untuk aspek Non-violence sudah tercapai didalam proses CAP 16 Kampung di Muara Baru.

Untuk Kampung Akuarium yang sudah

mengalami penggusuran, untuk aspek Social justice, didapatkan informasi bahwa Proses CAP 16 Kampung yang dilakukan di kampung Akuarium telah melaksanakan aspek social justice karena telah membahas secara kritis masalah penggusuran yang mereka alami dan masalah yang berpotensi menyebabkan mereka akan digusur kembali di masa depan. Sehingga dapat disimpulkan untuk aspek Social justice sudah tercapai didalam proses CAP 16 Kampung di Kampung Akuarium. Begitu juga untuk Kampung Muara Baru yang belum mengalami penggusuran, didalam proses CAP 16 Kampung telah dibahas secara kritis masalah penggusuran yang mereka alami dan masalah yang berpotensi menyebabkan mereka akan digusur kembali di masa depan. Sehingga dapat disimpulkan untuk aspek social justice sudah tercapai didalam proses CAP 16 Kampung di Muara Baru.

Untuk Kampung Akuarium yang sudah mengalami penggusuran, untuk aspek Inclusion, didapatkan informasi bahwa Proses CAP 16 Kampung yang dilakukan di kampung Akuarium telah menjalankan aspek inclusion, namun konsultan yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai jembatan penghubung antara warga dan pemerintah belum menempatkan posisi dirinya sebagai posisi yang setara didalam proses diskusi yang dilakukan. Sehingga dapat disimpulkan untuk aspek Inclusion sudah tercapai sebagian didalam proses CAP 16 Kampung di Kampung Akuarium walaupun ada catatan terkait prosesnya. Sementara untuk Kampung Muara Baru yang belum mengalami penggusuran, Proses CAP 16 Kampung yang dilakukan di kampung Muara Baru belum memiliki aspek inclusion didalamnya karena keterlibatan masyarakat masih rendah karena minim kolaborasi dan masih berkutat didalam pembangunan koalisi yang lebih ajeg diantara masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan untuk aspek

Inclusion belum tercapai didalam proses CAP 16 Kampung di Muara Baru.

Untuk Kampung Akuarium yang sudah mengalami penggusuran, untuk aspek Correct means, didapatkan informasi bahwa Proses CAP 16 Kampung yang dilakukan di kampung Akuarium sudah memiliki aspek cara yang benar, namun dari pihak konsultan masih sering tidak jujur dan ada kesalahpahaman pemerintah atas CAP 16 Kampung. Sehingga dapat disimpulkan untuk aspek Correct means sudah tercapai sebagian didalam proses CAP 16 Kampung di Kampung Akuarium walaupun ada catatan terkait proses dan aktor didalamnya. Sementara untuk Kampung Muara Baru yang belum mengalami penggusuran, Proses CAP 16 Kampung yang dilakukan di kampung Muara Baru belum memiliki aspek correct means didalamnya karena kehadiran masyarakat masih rendah karena bagian besar masyarakat masih belum melihat CAP 16 Kampung sebagai proses yang ingin dan dibutuhkan untuk dilakukan sebagai solusi dari masalah yang dialami. Sehingga dapat disimpulkan untuk aspek Correct means belum tercapai didalam proses CAP 16 Kampung di Muara Baru.

Untuk Kampung Akuarium yang sudah mengalami penggusuran, untuk aspek Ascertainable criteria, didapatkan informasi bahwa Proses CAP 16 Kampung yang dilakukan di kampung Akuarium sudah memiliki aspek kriteria yang dapat dipastikan, namun pemerintah memiliki kesalahpahaman terkait visi dan misi CAP 16 Kampung. Sehingga dapat disimpulkan untuk aspek Ascertainable criteria sudah tercapai sebagian didalam proses CAP 16 Kampung di Kampung Akuarium walaupun ada catatan terkait proses dan aktor didalamnya. Sementara untuk Kampung Muara Baru yang belum mengalami penggusuran, Proses CAP 16 Kampung yang dilakukan di kampung Muara Baru



belum memiliki aspek Ascertainable criteria didalamnya karena adanya perangkat administratif seperti lurah, yang bersikap resisten pada kegiatan CAP 16 Kampung sehingga sulit untuk dijelaskan proses CAP 16 Kampung sebagaimana proses tersebut dilakukan ke warga pada umumnya. Menurut warga, perangkat administratif seperti Lurah berpura-pura tidak paham sehingga komunikasi yang terjadi macet dan perlu dilakukan berbagai penyesuaian. Sehingga dapat disimpulkan untuk aspek Ascertainable criteria belum tercapai didalam proses CAP 16 Kampung di Muara Baru.

Untuk Kampung Akuarium yang sudah mengalami penggusuran, untuk aspek Categorical imperative, didapatkan informasi bahwa Proses CAP 16 Kampung yang dilakukan di kampung Akuarium sudah memiliki sebagian aspek Categorical imperative, karena dari pihak pemerintah tidak seluruhnya memiliki rasa empati yang sama, dan konsultan juga dirasakan masih menjaga jarak dengan warga. Sehingga dapat disimpulkan untuk aspek Correct means sudah tercapai sebagian didalam proses CAP 16 Kampung di Kampung Akuarium walaupun ada catatan terkait proses dan aktor didalamnya. Sementara untuk Kampung Muara Baru yang belum mengalami penggusuran, Proses CAP 16 Kampung yang dilakukan di kampung Muara Baru belum memiliki aspek Categorical imperative didalamnya karena menurut warga, masyarakat yang ada di Kampung Muara Baru perlu ada pembuktian dari pemerintah dengan melakukan pembangunan di kampung Muara Baru sehingga warga percaya bahwa pemerintah serius dalam menata dan mengajak warga untuk berdiskusi dalam merencanakan penataannya. Selama belum ada kepastian dari pemerintah terkait penataan kampung Muara Baru, warga akan terus merasa

gamang dan tidak yakin dengan kegiatan CAP 16 Kampung.

Selain itu menurut pendamping, tidak terbentuknya empati juga disebabkan koodinasi yang buruk didalam internal pemerintah, sehingga seolah pemerintah tidak mengalami dan menghasilkan progres terkait dalam diskusi CAP 16 Kampung. Sehingga dapat disimpulkan untuk aspek Categorical imperative belum tercapai didalam proses CAP 16 Kampung di Muara Baru.

### 3. Rationale harapan dari pasca penggusuran dan proses CAP 16 Kampung

Dari hasil wawancara terkait harapan para pemangku kepentingan terkait proses CAP 16 Kampung didapatkan hasil sebagai berikut.

Warga Kampung Akuarium sebagai warga kampung yang sudah mengalami penggusuran paksa memiliki harapan agar CAP 16 Kampung dirasakan sebagai proses yang bagus karena CAP 16 Kampung dilakukan dengan memberikan tanggung jawab kepada warga atas kondisi kampung dan dampaknya terhadap perkembangan dan penataan kota. Selain itu warga juga berharap agar CAP 16 Kampung dapat dilanjutkan dan dinikmati oleh setiap orang, terutama kelompok yang termarginalkan agar dapat diajak juga didalam pengembangan kota.

Warga Kampung Muara Baru sebagai warga kampung yang belum mengalami penggusuran memiliki harapan yaitu meski CAP 16 Kampung saat ini belum berjalan dengan baik, namun ada harapan CAP dapat berjalan dengan baik di masa depan sehingga dapat menjadi alat yang dapat diterapkan diseluruh kampung miskin yang ada di Jakarta. Selain itu, diharapkan ada kepastian bermukin untuk warga kampung yang belum digusur sehingga ada rasa aman dalam menjalani proses pengembangan dan penataan kampung didalam CAP 16

Kampung dan warga mau untuk mengikuti proses berjenjang yang ada.

Tim Pendamping Warga yang turut mendampingi warga selama proses CAP 16 Kampung memiliki harapan agar dikembalikannya rumah dan identitas warga negara dari warga kampung yang tergusur, dan dengan CAP 16 Kampung diharapkan dapat dikembalikan hal-hal seperti keakraban warga dengan pemerintah, kenangan, harapan dan masa depan yang sempat hilang pasca penggusuran. Selain itu diharapkan CAP 16 Kampung juga dapat menjadi jalan agar ada kesempatan untuk warga untuk secara bersama-sama bertanggung jawab dalam proses penataan kota.

JRMK sebagai kelompok masyarakat memiliki harapan agar dilakukan peninjauan kembali oleh pemerintah atas segala hal yang telah dilakukan dan dibentuk penataan ulang dan perencanaan jangka panjang, serta sistem yang sifatnya bottom up. Hal ini dikarenakan sejauh ini peran konsultan yang berfungsi sebagai jembatan antara warga dan pemerintah dalam proses penataan kampung belum berhasil secara maksimal. Kemudian menurut Bapak Gugun, penataan kampung dan kota tidak lagi hanya dimaknai secara fisik, seperti mengedepankan pembangunan infrastruktur dan penggusuran, tetapi dengan CAP 16 Kampung, hal itu dapat diubah menjadi proses sosial dalam penataan kota, yang warga dari setiap kampung diajak dalam proses kolaborasi untuk menentukan masa depan pembangunan secara bersama.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diwakili Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman memiliki harapan agar tidak ada lagi perencanaan di dalam CAP 16 Kampung yang hanya sekedar pembangunan yang bersifat fisik, namun juga ada perubahan mindset dari setiap warga kampung untuk sadar dalam menjaga

keasrian, kebersihan dan kelestarian kampung yang merupakan bagian dari kota. Sehingga ada peningkatan kualitas lingkungan dan dapat menjaga kepentingan komunal secara bersama.

Tim Advokat yang mendampingi warga memiliki harapan agar Pemerintah dapat mau bermediasi di proses kedepannya secara setara dan tidak sekedar beralasan sedang menjalankan kewenangannya. Permasalahan sengketa tanah dengan masyarakat sebaiknya memakai jalur perdata. Juga, meski tim advokat mengeluarkan tuntutan dalam bentuk uang, pada dasarnya yang diinginkan oleh warga adalah dikembalikan lagi kampungnya, karena menurut warga, eksistensi kampung tidak dapat dinilai dengan uang.

Komnas HAM sebagai elemen negara yang menjaga berjalannya Hak Asasi Manusia memiliki harapan agar penggusuran paksa tidak terjadi lagi, karena didalam penggusuran paksa yang terjadi, selalu tidak akan pernah tercapai win-win solution, meskipun ada SOP yang membawahnya. Sebelum penggusuran dilakukan, pemerintah seharusnya datang dengan proses diskusi dan bersama-sama membangun infrastruktur ganti yang sesuai dengan kebutuhan korban penggusuran. Minimal sama dengan sebelum digusur. Dan menurut Komnas HAM, tantangan kedepannya bagi Komnas HAM adalah Komnas HAM dapat mencari langkah-langkah yang dapat ditempuh sehingga aparat dan pemerintah dapat menjalankan kegiatan dan kebijakan, terutama soal penggusuran, dapat mengikuti rekomendasi dan pandangan Komnas HAM.

## Pembahasan

Kegiatan penggusuran, terutama penggusuran paksa, seharusnya dibuka dengan satu pertanyaan besar: apakah sebenarnya penggusuran itu? Apakah

penggusuran itu merupakan suatu bentuk hukuman? Jika penggusuran paksa itu dilakukan sebagai hukuman, maka kejahatan apa yang dilakukan sehingga korban dari penggusuran paksa layak untuk menerima hukuman tersebut? Jika bukan suatu hukuman, maka penggusuran itu adalah suatu kegiatan yang sangat luar biasa karena sifatnya yang menyiksa korban dari penggusuran tersebut. Hal ini tentunya karena mengingat adanya korban jiwa pasca penggusuran dan kerugian fisik dan non fisik serta hilangnya identitas sebagai warga negara.

Penggusuran, jika merujuk pada konvensi HAM, adalah suatu fenomena yang sangat problematik. Meski seringkali tidak dapat dihindarkan didalam proses pembangunan, berdasarkan general comment no 7, penggusuran harus dengan cara apapun jika dapat dilakukan harus dicegah, dan jika penggusuran tetap harus dilakukan karena tidak ada pilihan lain, maka pemindahan yang dilakukan harus didasarkan pada hukum yang mengacu pada hak asasi manusia dan dalam proses hukum yang adil, yang didalam proses tersebut negara wajib untuk memberikan pendampingan hukum dan jika telah ditentukan keputusan hukumnya, negara harus dengan segera memberikan remedy/perbaikan terhadap korban penggusuran.

Didalam konteks kasus yang ada, yaitu penggusuran di kampung Akuarium, menurut staf Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, sebenarnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak dalam kondisi tidak memiliki opsi lain, yaitu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki opsi untuk melakukan konsolidasi lahan dengan warga. Maka kondisi ini menunjukkan bahwa penggusuran sebenarnya dapat dicegah dan tidak perlu untuk dilakukan. Selain itu korban penggusuran juga wajib diperlakukan sesuai

hukum yang berkesesuaian dengan HAM, namun hal tersebut tidak terjadi karena adanya dugaan pelanggaran HAM dengan penggunaan kekuatan berlebih dalam bentuk diikutsertakannya aparat didalam proses penggusuran. Hal ini tentunya sangat disayangkan karena ketidakmampuan komponen negara dalam melihat opsi-opsi lain, sehingga jatuh korban yang bahkan ada korban yang mengalami kehilangan jiwa pasca penggusuran.

Penderitaan yang sangat besar tersebut sebenarnya dapat dicegah oleh Pemerintah jika pemerintah melakukan tugasnya, yaitu Pemerintah wajib memberitahukan dan mendiskusikan alasan dilakukannya penggusuran kepada korban yang digusur hingga didapatkan pemahaman bersama dan kesepakatan. Hal ini sayangnya dilanggar oleh Pemprov DKI dengan tidak menginformasikan tujuan penggusuran dan menolak segala bentuk mediasi yang coba untuk dilakukan. Selain itu Pemerintah juga diberikan kewajiban untuk memberikan bantuan hukum dan melaksanakan proses penggusuran sesuai hukum. Hal ini tidak dilakukan secara menyeluruh oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan proses penggusuran tetap dilaksanakan meskipun prosesnya tengah berperkar di pengadilan, yang seharusnya adalah proses yang dihormati oleh setiap pemangku kepentingan dengan menghentikan sementara segala proses penggusuran yang terjadi.

Pemerintah memang sudah melakukan satu hal berdasarkan standar PBB yaitu kewajiban untuk memberikan perbaikan dengan segera. Hal ini sudah dilakukan oleh pemerintah dengan menyediakan rusun dalam jumlah yang cukup kepada korban penggusuran. Namun dalam perspektif HAM, solusi ini belum memenuhi syarat karena solusi yang diberikan harus dibicarakan dengan korban penggusuran dan bukan

sifatnya sepihak. Korban penggusuran kampung Akuarium tidak diberikan opsi lain selain menerima rusun tersebut, dan jika tidak menerima maka konsekuensi yang diterima adalah penderitaan yang sangat besar seperti hilangnya identitas dan keamanan bermukim. Sementara untuk kampung yang akan diwacanakan akan digusur, wacana penggusuran juga diberikan secara tiba-tiba dan tidak dilakukan dengan mencari solusi secara bersama-sama sejak jauh-jauh hari yang tentunya nasibnya akan berakhir sama seperti kampung yang telah tergusur.

Tentunya Pemprov DKI memiliki justifikasi dari penggusuran yang dilakukan. Justifikasi yang pertama Pemprov DKI memiliki klaim tanah negara bahwa tanah yang ditempati oleh warga merupakan tanah yang dimiliki oleh negara. Justifikasi yang kedua terkait zonasi tempat kampung Akuarium yang tegusur tidak berada didalam zonasi pemukiman. Justifikasi yang ketiga terkait permasalahan kesehatan warga yang dirasakan buruk seperti adanya dugaan penderita TBC dan pengguna narkoba yang tinggal di kampung tersebut. Justifikasi yang keempat terkait kawasan pemukiman kumuh yang Pemprov DKI memang diberikan mandat untuk mengurangi kekumuhan didalam kota.

Justifikasi yang ada juga seolah dibenarkan oleh fakta bahwa Komnas HAM juga tidak mendefinisikan penggusuran paksa sebagai pelanggaran HAM berat didalam alam hukum Indonesia. Namun tentunya setiap justifikasi yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tidak ada yang membenarkan proses penggusuran paksa yang dilakukan dalam perspektif HAM, terutama pada rantai kejadian penggusuran paksa yang banyak memiliki kesalahan proses dilakukan sehingga melanggar hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh korban, misalnya penggusuran dilakukan pada saat

ujian sekolah, hari raya keagamaan dan proses pengadilan yang secara eksplisit dilarang. Selain itu Indonesia, meski belum mendefinisikan penggusuran paksa sebagai pelanggaran HAM berat, Indonesia telah turut meratifikasi HAM terkait ecosoc didalam UU no 11 tahun 2005, yang berarti semangat HAM tersebut harus diturunkan kedalam peraturan-peraturan yang ada dibawahnya dengan menolak praktik pelanggaran HAM didalam kebijakan yang diambil.

Maka dapat disimpulkan kegiatan penggusuran ini adalah suatu hal yang sangat bermasalah karena sebenarnya penggusuran paksa ini dapat dicegah jika pemerintah mau mempertimbangkan opsi-opsi yang ada, kemudian banyak memiliki kesalahan-kesalahan dalam prosedur yang dilakukan, dan berdampak sangat buruk karena penderitaan yang begitu besar yang dihasilkan.

Sementara untuk proses CAP 16 Kampung yang dilakukan di 2 kampung di Jakarta Utara, yaitu kampung Akuarium dan kampung Muara Baru memiliki hasil yang berbeda jika didalam didalam perspektif Peacemaking criminology. Dapat dilihat, kampung Akuarium secara umum prosesnya berjalan dengan lebih baik. Secara internal ada 2 teori didalam Peacemaking criminology yang dapat menjelaskan alasan fenomena proses CAP 16 Kampung yang dilakukan di Kampung Akuarium, dapat berjalan dengan lebih baik.

Teori yang pertama adalah teori tentang penderitaan (Quinney, 1991). Menurut Quinney, penderitaan adalah bayaran dari eksistensi manusia. Penderitaan, besar maupun kecil tidak dapat dihindari oleh manusia. Menurut Quinney, penderitaan adalah jalan menuju kesadaran. Maka ketika tercipta kesadaran yang sifatnya kolektif, akan lahir sebuah perasaan spiritual yang disebutkan sebagai kekosongan. Kekosongan

yang muncul didalam jiwa manusia, akan membuka alam kebijaksanaan, yang dari sana manusia akan terlepas dari sifat-sifat manusia yang membatasi manusia itu sendiri seperti keangkuhan dan egoisme. Pada saat itu terjadi, akan tercipta cinta kasih pada sesama dan ikatan yang kuat sebagai sesama manusia.

Kampung Akuarium adalah salah satu kampung yang mengalami penggusuran. Warga yang digusur tidak serta-merta berpindah. Warga yang bertahan tinggal di puing selama kurang lebih 2 tahun dan hidup secara komunal. Dari pengalaman tersebut, dapat dilihat jika warga kampung Akuarium yang bertahan, menderita secara bersama-sama dan dari penderitaan tersebut terbangun empati sesama warga. Empati yang terbangun juga tidak terbatas antara sesama warga, namun juga melihat penderitaan yang dialami warga kampung Akuarium, banyak elemen masyarakat yang merasa iba dan dari sana terbangun juga rasa empati.

Sementara warga kampung Muara Baru, karena tidak memiliki ancaman nyata penggusuran dan baru bersifat wacana, maka tidak tercipta sebuah sense of urgency yang hal tersebut muncul di kampung Akuarium karena berurusan langsung dengan nyawa. Warga masih berada didalam keadaan normal, dan mungkin berpikiran bahwa mereka telah tinggal puluhan tahun di wilayah tersebut, dan untuk dipindahkan saat ini tampak tidak meyakinkan. Selain itu warga kampung Muara Baru terpisah menjadi kelompok-kelompok yang masih sulit untuk saling bekerja sama. Apalagi wacana penggusuran kampung mereka bukan yang pertama, maka tidak ada keyakinan diantara sesama warga. Selain itu kampung Muara Baru tidak mengalami eksposur yang sama dengan kampung Akuarium, baik dari sisi media maupun wacana publik.

Kemudian teori yang kedua, menurut Gesualdi, ketidakadilan yang ada dimasyarakat jika ingin dihilangkan adalah dengan melakukan aksi afirmasi. CAP 16 Kampung dapat dikatakan sebagai aksi afirmasi (Gesualdi, 2014). Salah satu kelompok masyarakat yang memperjuangkan CAP 16 Kampung paling awal adalah kampung Akuarium. Maka kampung Akuarium tidak hanya memiliki sense of urgency, tetapi memiliki juga sense of duty sebagai pionir dari kegiatan CAP 16 Kampung. Sementara kampung Muara Baru memiliki peran serta warga yang berbeda dengan peran serta warga dari kampung Akuarium. Beberapa tokoh masyarakat ada yang tidak setuju dengan CAP 16 Kampung dan banyak juga warga yang acuh tak acuh dalam aksi afirmasi yang dilakukan karena tidak benar-benar sudah terancam keberadaannya.

Untuk konsultan, pemerintah sendiri sebagai penyewa jasa konsultan sudah mengakui bahwa konsultan yang diminta untuk bekerja sama dengan masyarakat tidak berjalan dengan baik. Yang menjadi saran dari JRMK adalah dengan tidak menggunakan konsultan, tetapi fasilitator yang berasal dari warga kampung itu sendiri. Fasilitator ditugaskan untuk menggali perencanaan dari masyarakat dan karena fasilitator berasal dari dan tinggal di kampung itu juga, maka akan lebih mudah untuk dilakukan proses fasilitasi. Hal ini menjadi sangat penting, karena aspek kehadiran warga masih belum optimal di kampung selain kampung Akuarium. Penunjukan konsultan oleh pemerintah dari pengalaman yang sudah ada tidak berhasil memenuhi tujuan tersebut.

Sementara pemerintah belum memahami proses CAP 16 Kampung yang dilakukan. Pemerintah masih menganggap ini sekedar proyek yang memiliki waktu mulai dan waktu selesai. Sementara CAP 16



Kampung yang diajukan oleh warga tidak seperti itu. CAP 16 Kampung yang diajukan didasarkan pada semangat kolaboratif yang menginginkan warga untuk ikut serta diajak dalam proses pembangunan kampung dan penataan kota yang selama ini mereka buta akan hal tersebut. Secara ideal ini sejalan dengan proses Peacemaking criminology yang prosesnya berjalan secara terus menerus dan tidak terpaksa pada hasil.

Secara umum, harapan dari setiap pemangku kepentingan tidak ada yang bertentangan. Jika dilihat, justru adanya kesempatan untuk bersinergi antara masing-masing pemangku kepentingan. Misalnya pemerintah dengan Komnas HAM, untuk mewujudkan pembangunan yang menyeluruh dapat dilakukan kajian bersama pembangunan yang didasarkan pada pedoman HAM. Sehingga kegiatan yang kontraproduktif seperti penggusuran dapat dihindari dan dapat terjadi peningkatan standar hidup warga kota DKI Jakarta karena didasarkan pada pedoman HAM yang bersifat humanis. Pada dasarnya, setiap pemangku kepentingan memiliki harapan yang didasarkan pada kehidupan yang memiliki kolaborasi secara bersama dan harmonis.

## Kesimpulan

Penggusuran merupakan fenomena di perkotaan terkait pembangunan dalam upaya peningkatan kualitas kota dan manusia. Namun jika dilakukan secara paksa, penggusuran dapat menjadi kegiatan yang kontraproduktif karena penggusuran paksa akan memindahkan manusia secara paksa tanpa persetujuan seluruh pemangku kepentingan sehingga akan menciderai manusia dan kemanusiaan, sesuatu yang sebenarnya menjadi tujuan awal dari memindahkan penghuni daerah tersebut. Potensi permasalahan yang dapat lahir dari penggusuran secara paksa, harus dicegah

oleh pemerintah dengan menghargai proses yang sesuai dengan hak asasi manusia. Salah satunya adalah dengan tidak melakukan penggusuran, sebelum adanya proses diskusi yang adil dan sesuai dengan HAM, yang konklusinya dapat diterima dan dimengerti oleh semua pihak.

CAP 16 Kampung jika dilihat dalam perspektif Peacemaking criminology, dapat dikatakan sebagai bentuk praksis dari Peacemaking. Semua aspek Peacemaking seperti non-violence, social justice, inclusion, ascertainable criteria dan categorical imperative ada didalam proses CAP 16 Kampung. CAP 16 Kampung, karena sifatnya yang organik dan lahir dari masyarakat sebagai reaksi dari fenomena penggusuran, maka prosesnya juga beradaptasi didalam kondisi dan lingkungan yang berasal dari berbagai kalangan, yang berarti didalam proses berjalannya diharuskan untuk bisa membumikan konsep-konsepnya didalam komunikasi agar dapat dimengerti oleh setiap pemangku kepentingan.

Hal ini yang menjadi kekuatan utama dari CAP 16 Kampung dalam proses penyelesaian permasalahan penggusuran yang dialami oleh 16 Kampung yang menjadi target CAP 16 Kampung dibanding penyelesaian lain yang sifatnya hanya satu arah. Namun kekuatan utamanya yang merupakan sifat untuk merangkul semua orang, adalah kelemahannya itu sendiri. CAP 16 Kampung yang harus merangkul seluruh elemen pemangku kepentingan, berimplikasi pada prosesnya yang akan berjalan lama dan tidak langsung memiliki kepastian dan produk hukum. Hal ini tidak bertentangan dengan prinsip Peacemaking criminology yang memang tidak terikat dengan waktu, namun hal ini dalam prakteknya menuntut banyak diskresi dan penyesuaian demi penyesuaian.

Untuk Kampung yang telah digusur, CAP 16 Kampung akan mengubah sense of urgency yang dimiliki warga pasca

penggusuran menjadi sense of purpose dengan melahirkan harapan bahwa setelah mereka digusur tidak berarti menjadi akhir eksistensial dari kehidupan mereka. Sementara untuk kampung yang akan diwacanakan tergusur, CAP 16 Kampung akan mengubah sense of urgency menjadi sense of duty, yang mendorong warga untuk bersama-sama mencari solusi yang harus dilakukan atas permasalahan yang terjadi dan bersama-sama menyelesaikannya. Untuk kampung yang baru diwacanakan untuk digusur, sense of duty masih berusaha untuk dibangun, namun proses CAP 16 Kampung sudah berakhir. Kebijakan untuk menyelesaikan CAP 16 Kampung dalam tenggat waktu tertentu tentu saja tidak sejalan dengan proses Peacemaking criminology yang prosesnya tidak dibatasi dengan waktu.

Dengan harapan yang sama-sama positif dari seluruh pemangku kepentingan, yaitu pembangunan yang partisipatif, kepastian bermukim, dikembalikannya hak warga, fokus pada proses sosial dibanding fisik, pembentukan mindset warga yang lebih bersih, asri dan lestari; dan penggusuran paksa tidak terjadi lagi, CAP 16 Kampung kedepannya diharapkan dapat belajar dari permasalahan yang ada sebelumnya dan dapat memperbaiki kesalahan tersebut sehingga dapat memenuhi harapan dari setiap pemangku kepentingan dan tercipta

proses menuju damai.

## Saran

Penggusuran paksa yang dilakukan terhadap kampung Akuarium dapat dilihat telah menghasilkan luka sosial, baik luka secara fisik, finansial, emosi dan keamanan cultural. Hal ini tentunya kontraproduktif dengan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang menjadi tujuan dari Pemprov DKI. Terutama jika penggusuran yang dilakukan ditujukan sebagai hukuman. Pemerintah harus sedapat mungkin menghindari penggusuran paksa dan mencari solusi alternatif yang memungkinkan.

Untuk kampung Akuarium, yang harus dilakukan adalah dengan tetap menjaga empati yang sudah terbangun antara sesama warga dan dengan pemerintah. Untuk kampung Muara Baru, yang harus dilakukan adalah dengan memberi waktu agar tercipta sense of duty dari warga dengan sesama warga dan warga dengan pemerintah untuk sama-sama membangun komunikasi dan saling mendengarkan sehingga tercipta empati. Pemerintah diharapkan tidak mengambil aksi yang berujung pada kekerasan secara cepat seperti penggusuran atau pengusiran. Pemerintah juga dapat berfokus pada persiapan solusi yang akan diberikan sesuai dengan kesepakatan bersama warga jika nantinya penggusuran tidak terelakkan.

## Daftar Referensi

- Braswell, Michael, John Fuller, Bo Lozoff. (2001). *Correction, Peacemaking, And Restorative Justice: Transforming Individuals And Institutions*. Amerika Serikat: Routledge Publishing.
- Editorial detiknews. (2006, Agustus 4). Sutiyo Diminta Stop Penggusuran. Retrieved from detiknews: <https://detik.com/news/berita/d-650244/sutiyo-diminta-stop-penggusuran/>
- Fuller, J. (2003). *Peacemaking Criminology*. In D. S. Hatty, *Controversies in Critical Criminology* (pp. 85-95). Cincinnati: Anderson.
- Gesualdi, L. J. (2014). *A Peacemaking Approach to Criminology: A Collection*

- of Writings. . Amerika Serikat. Penerbit: University Press of America: Oxford Journal.
- Harris, M. K. (1991). Moving into the New Millenium: Toward a Feminist Vision of Justice. In H. E. Pepinsky, & R. Quinney, *Criminology as Peacemaking* (pp. 83-97). Indiana: Indiana University Press.
- Januardy, Alldo Fellix. (2015). *Kami Terusir: Laporan Penggusuran Paksa di Wilayah DKI Jakarta Januari - Agustus 2015*. DKI Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.
- Januardy, Alldo Fellix; Julio Castor Achmadi; Cindy Iqbalini Fortuna. (2016). *Seperti Puing: Laporan Penggusuran Paksa di Wilayah DKI Jakarta Tahun 2016*. DKI Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.
- Johnston, H. (2014). *What is a Social Movement?* Cmbridge: Polity Press.
- JRMK. (2018, January 17). Program Peluncuran CAP 2018. Retrieved from Kampung Kota: <http://kampungkota.net/2018/01/17/program-peluncuran-cap-2018/>
- Ness, V., D. W., & K. S. (2002). *Restoring Justice* 2nd ed. Cincinnati: Anderson.
- Pepinsky, H. (2000). *A Criminologist's Quest for Peace*. Bloomington: Indiana University.
- Pepinsky, H. (2013). *Peacemaking Criminology*. Amerika Serikat,: Springer Science+Business Media Dordrecht 2013.
- Pepinsky, Harold E., and Richard Quinney. (1991). *Criminology as peacemaking*. Bloomington: Indiana University Press.
- Powell, R. R. (2006). Evaluation Research: An Overview. *Library Trends*, 102-119.
- Quinney, R. (1991). *The Way of Peace on Crime, Suffering and Service*. In H. E. Pepinsky, & R. Quinney, *Criminology as Peacemaking* (pp. 3-13). Indiana: Indiana University Press.
- Rutman, L. (1984). *Evaluation Research Methods*. California: Sage Publisher.
- Salmen, L. (2002). *Beneficiary Assessment An Approach Described*. Washington DC: The World Bank.
- Schwendinger, H., & Schwendinger, J. (2014). *Defenders of Order or Guardian of Human Rights?* *Social Justice* no 40, 87-117.
- Scriven, M. (1991). *Evaluation Thesaurus*, Fourth Edition. California: Sage Publisher.
- Tarrow, S. (2011). *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics* 3rd Edition. Cambridge: Cambridge University Press.